

DKP3 Temukan Hewan Kurban tak Layak Jual



EDI YUSUF/REPUBLIKA

PERIKSA KESEHATAN

Petugas pemeliharaan hewan kurban, Ishak melakukan pemeriksaan rutin kesehatan domba kurban di sebuah tempat penjualan hewan kurban di Jl Gunung Batu Bandung. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesehatan hewan kurban agar tetap sesuai syariah layak kurban.

Lilis Sri Handayani
Riga Nurul Iman

Plastik pembungkus daging hendaknya tidak berwarna hitam karena mengandung karbon.

CIREBON – Masyarakat yang akan membeli hewan kurban, harus teliti memeriksa kesehatan hewan. Di Kota Cirebon, tim Dinas Kelautan, Peternakan, Perikanan dan Pertanian (DKP3) Kota Cirebon, menemukan hewan kurban yang tak layak jual.

Hal itu diketahui saat

tim memeriksa hewan kurban di sejumlah penjual hewan. Tim yang terdiri dari dokter hewan dan petugas kesehatan hewan itu tersebar ke lima kecamatan yang ada di Kota Cirebon.

Saat tim memeriksa salah satu penjual hewan kurban di daerah Samadikun, Kelurahan, Kejaksan, Kecamatan Kejaksan, mereka menemukan kambing yang sakit mata. Selain itu, mereka juga menemukan kambing yang belum cukup umur untuk dijual. Hal tersebut terlihat gigi bawah kambing yang belum tanggal.

Melihat kondisi itu, petugas pun tidak memasang label layak ke hewan-hewan yang tidak layak jual tersebut. Sedangkan terhadap hewan-hewan yang memenuhi syarat kesehatan

dan umur, petugas memberikan label layak.

Kepala Dinas DKP3 Kota Cirebon, Odi Suryadi mengimbau, masyarakat untuk teliti sebelum membeli hewan kurban. Apalagi, kata dia, hewan kurban memiliki syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan syariah Islam.

Adapun syarat hewan kurban, di antaranya menyangkut umur yang minimal harus satu tahun. Selain itu, hewan pun harus dalam kondisi sehat dan terbebas dari segala macam penyakit. "Karena itu, belilah hewan yang memiliki label layak jual dan layak konsumsi," tegas Odi.

Dikatakan Odi, selain memeriksa di tempat penjualan hewan, pihaknya juga akan menerjunkan tim ke masjid-

masjid saat pelaksanaan kurban. Hal itu dimaksudkan untuk memeriksa kesehatan organ dalam dari hewan kurban.

Kata Odi, bila ternyata ditemukan organ dalam seperti hati dan paru-paru hewan yang terdapat bintik-bintik, maka petugas akan langsung menyita. Pasalnya, hewan itu berarti tidak layak konsumsi. "Harus dikubur atau dibakar," katanya menegaskan.

Lebih lanjut Odi mengatakan, petugas pelaksana kurban di masjid harus pula memperhatikan plastik pembungkus daging. Dia mengimbau, plastik yang digunakan tidak berwarna hitam karena mengandung karbon. Menurut dia, plastik yang digunakan sebaiknya berwarna putih bening.

Kepala Dinas Peternakan Jabar, Koesmayadi TP menjelaskan, pihaknya akan melakukan pengawasan hewan kurban secara ketat pada lokasi-lokasi titik masuk Jabar.

Hal ini, kata dia, agar hewan kurban yang dikonsumsi masyarakat Jabar, terbebas dari berbagai penyakit, terutama antraks. "Pengawasan itu dilakukan dengan menerjunkan tim kesehatan hewan ke sejumlah daerah," katanya menjelaskan.

Selain itu, Koemayadi pun meminta warga untuk berlaku waspada bila berniat membeli daging hewan untuk kebutuhan konsumsi porteinnya. "Belilah hewan yang ada sertifikasi sehatnya," katanya menegaskan.

■ ed: agus

Jabar Segera Bangun RSH

Maman Sudiaman

BANDUNG – Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, mendukung rencana pembangunan Rumah Sakit Hewan (RSH) di Jawa Barat. Menurutnya, keberadaan RSH di Jabar sangat dibutuhkan mengingat kesehatan hewan berdampak kepada kesehatan manusia.

"Apalagi, saat ini, jumlah penduduk Jabar mencapai 43 juta jiwa lebih. Dengan jumlah penduduk sebanyak itu, kebutuhan daging hewan ternak pun sangat tinggi," katanya saat melepas Tim Kesehatan Hewan Jabar, dalam rangka menyambut Idul Adha 1430 Hijriyah, Sabtu (13/11).

Keberadaan RSH itu nantinya, sambung Heryawan, diharapkan akan memberikan rasa aman bagi warga Jabar yang mengonsumsi daging hewan.

Pada kesempatan itu, Heryawan melepas sekitar 100 personel tim gabungan dari Dinas Peternakan Pemerintah Provinsi Jabar, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Jawa Barat dibantu mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan IPB tersebar ke Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Mereka diterjunkan guna melakukan monitoring kesehatan hewan kurban. Diharapkan kehadiran tim di tengah masyarakat

akan memberikan jaminan kesehatan bagi hewan yang akan dikurbankan.

Selain itu, Heryawan juga mendorong dibentuknya Fakultas Kedokteran Hewan di Unpad dan meminta rector IPB untuk menambah kuota penerimaan jumlah calon mahasiswa kedeokteran hewan. Pasalnya, ungkapa dia, saat ini, dari kebutuhan 2.000 dokter hewan per tahun di Indonesia, baru sanggup dipenuhi 300 dokter hewan.

Dikatakan Gubernur, hewan kurban yang sudah diperiksa dan dinyatakan sehat, harus benar-benar aman dikonsumsi masyarakat. Jangan sampai, tegas dia, para penerima daging kurban menjadi korban jika dagingnya tidak memenuhi syarat kesehatan.

Menurut Heryawan, masyarakat yang akan mengonsumsi daging

hewan, harus bertambah sehat karena kecukupan asupan protein. Bukan malah sebaliknya, menjadi sakit akibat kondisi hewan yang dipotong dagingnya tidak sehat. "Tentunya upaya pencegahan dengan sosialisasi harus terus dilakukan," tegasnya.

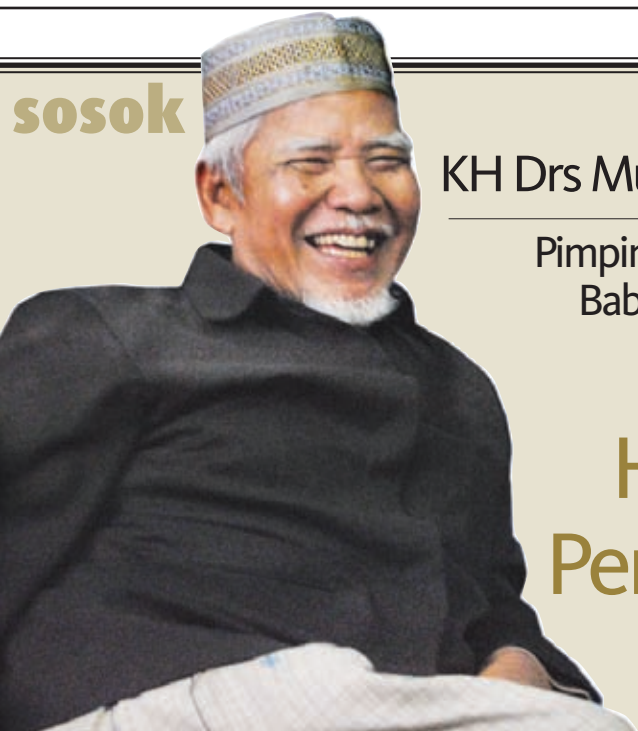
Kepala Dinas Peternakan Jabar, Koesmayadi TP menjelaskan, setiap tahun terjadi pertumbuhan sekitar 10 persen jumlah hewan kurban di Jabar. Demikian juga dengan prediksi kebutuhan hewan kurban untuk tahun 2011 yang juga tumbuh dikisaran 10 persen.

Tentunya, ucap Koemayadi, kondisi itu harus dibarengi dengan langkah penyehatan hewan ternak, termasuk sosialisasi dan upaya pencegahan hingga pengobatan. Bahkan, kata dia, sejak 2009, Jabar sudah dapat dikatakan bebas penyakit antraks. ■ ed: agus



EDI YUSUF/REPUBLIKA

Gotong royong bangun rumah di tempat bencana



KH Drs Muchtar Adam S
Pimpinan Ponpes Babussalam

Hargai Perbedaan

EDI YUSUF/REPUBLIKA

Hilangnya kesadaran pluralitas, masih terus membumi di Indonesia hingga saat ini, baik pluralitas dalam berbangsa dan beragama. Hal itu, ditandai kemelut isu perbedaan seputar suku, agama, dan ras (SARA) yang akhir-akhir ini banyak terjadi.

Bahkan, dalam tiga bulan terakhir, masih lekat dalam benak kita peristiwa Tarakan, Kalimantan; Ampera, Jakarta Selatan, dan pemukulan jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). Semuanya terjadi, karena cenderung menguatnya sukuisme dan fanatisme agama yang kemudian menghilangkan hak agama lain.

Kondisi demikian bakal terus terjadi jika tidak ditanamkan pemahaman bahwa perbedaan itu rahmat (kasih sayang). Perbedaan-perbedaan itu, mestinya dijadikan alasan sebagai pemersatu dan dinilai sebagai suatu keharusan yang tak terhindarkan. Se-

hingga keberadaannya, harus dihormati dan dihargai.

Antisipasinya, umat Islam sendiri harus memahami lintas *mazhab*. Mereka perlu belajar tentang perbandingan *mazhab*, sehingga saat berinteraksi dalam dinamika pemahaman Islam, mereka tak akan terkungkung oleh satu pemahaman. Dengan begitu, klaim kebenaran yang menafikan kebenaran pemahaman orang lain, dengan sendirinya akan luntur.

Pemahaman lintas *mazhab* inilah yang menjadi salah satu fokus perhatian di Pondok Pesantren (Ponpes) Babussalam, Dago Atas, Cimenyan, Bandung. KH Drs Muchtar Adam, sebagai pimpinan umum, bertekad menanamkan pemahaman santri yang tidak berkuat pada satu sekte saja, tetapi semua sekte.

Menghargai sekte dan perbedaan pemahaman itu, merupakan prinsip kemanusia-

an universal, seperti termaktub dalam Alquran. Dalam kitab suci itu, dijelaskan tentang lima hak yang mesti didapat manusia secara wajar. Kelimanya adalah hak hidup, hak milik, hak kemerdekaan, hak memperoleh ilmu pengetahuan, dan hak pengharapan.

Konsep kemerdekaan itu, ingin ia mulai dari para santri di yayasan yang diusahanya. Ia hendak menghilangkan kungkungan pemahaman golongan tertentu yang terkotakkan.

Misalnya, santri tidak ditekankan menguasai fiqihnya Imam Syafi'i saja, tetapi juga Hanafi, Hambali, dan Imam Maliki. Begitu pun dalam akidah. Penguatan dalam menerima perbedaan yang tidak didasarkan pada satu doktrin itu akan membuka kran berpikir santri, bebas tanpa belenggu.

■ c26, ed: agus